

TANTANGAN DAN DINAMIKA TRANSFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA EKOLOGI DAN PEMBANGUNAN KOTA-DESA

Dino Haris Munandar⁽¹⁾, Viktor Juliandi Purnama⁽²⁾, Hicha Fiskadea Simanjuntak⁽³⁾,
Syarifah Rahmadani⁽⁴⁾
Universitas Tanjungpura

E1031211052@student.untan.ac.id

Abstrak

Pada tulisan ini menjelaskan bagaimana tantangan dan dinamika yang muncul seiring dengan transformasi kebijakan pemerintah pada ekologi dan pembangunan kota-desa. Fokus utama melibatkan isu-isu kritis seperti perubahan dalam regulasi pengelolaan lingkungan, dampak pada pembangunan kota-desa, dan implikasi terhadap partisipasi masyarakat. Melalui analisis hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa transformasi kebijakan telah membawa perubahan positif, termasuk peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur hijau. Namun, resistensi dan ketidakpastian muncul sebagai tantangan utama. Implikasi transformasi kebijakan sangat terlihat pada konsep ekologi pembangunan, dengan dampak positif pada lingkungan dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun, perlu dicatat bahwa respons masyarakat bervariasi, menciptakan dinamika yang kompleks antara penerimaan dan resistensi terhadap kebijakan baru. Pada hasil tulisan yang didapatkan dan dipaparkan, transformasi kebijakan memainkan peran kunci dalam mencapai keberlanjutan, namun perlu dipertimbangkan secara holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Ekologi, Pembangunan Kota-Desa, Tantangan, Transformasi Kebijakan

Abstract

This article explains the challenges and dynamics that arise along with the transformation of government policy on ecology and urban-rural development. The main focus involves critical issues such as changes in environmental management regulations, impacts on urban-rural development, and implications for community participation. Through analysis of the results and discussion, it was found that policy transformation has brought positive changes, including improved management of natural resources and development of green infrastructure. However, resistance and uncertainty emerge as major challenges. The implications of policy transformation are very visible in the ecological concept of development, with positive impacts on the environment and more sustainable development. However, it should be noted that societal responses vary, creating a complex dynamic of acceptance and resistance to new policies. In the results obtained and presented, policy transformation plays a key role in achieving sustainability, but needs to be considered holistically and involving all stakeholders.

Keywords: Ecology, Urban-Rural Development, Challenges, Policy Transformation

PENDAHULUAN

Setiap pemerintah memiliki kebijakan yang siap untuk dikeluarkan. Seperti halnya dalam kebijakan setiap kota dan desa demi sebuah pembangunan yang maju. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama pada bagian pembangunan tentunya harus disegerakan karena demi mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan sebuah kawasan baik bagi kota maupun desa (April et al., 2021). Dalam era modern yang dipenuhi dengan tantangan ekologi dan pembangunan masyarakat, peran pemerintah menjadi semakin krusial. Kota dan desa sebagai entitas utama kehidupan manusia menjadi sorotan utama, di mana pengelolaan ekologi dan pembangunan masyarakat menjadi ujian bagi setiap kebijakan yang diambil. Pemerintah yang terlibat dalam kejadian yang kompleksitas ini menjadi suatu hal yang mendasar untuk menciptakan perubahan dalam suatu kawasan. Pembangunan kota dan desa merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi kebijakan pemerintah pada ekologi dan pembangunan kota-desa menjadi krusial dalam menangani berbagai tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Perubahan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota-desa serta tantangan yang dihadapi.

Urbanisasi yang cepat mencerminkan pergeseran dramatis penduduk menuju perkotaan. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam manajemen sumber daya dan infrastruktur, memicu perlunya transformasi kebijakan yang responsif terhadap perkembangan pesat di kota-desa. Perubahan pola konsumsi menyoroti evolusi perilaku masyarakat dalam penggunaan energi, makanan, dan sumber daya alam. Transformasi kebijakan diperlukan untuk

mengakomodasi perubahan ini, mengarah pada kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dampak perubahan iklim menjadi faktor kunci yang memicu transformasi. Kejadian ekstrem, fluktuasi iklim, dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka dalam menghadapi realitas baru ini. Inisiatif pemerintah yang proaktif mencakup langkah-langkah awal dan kebijakan yang diambil untuk merespons tantangan ekologi dan pembangunan. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memberikan solusi konkret terhadap isu-isu yang muncul. Melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan kebijakan yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang (Cipta & Pidana, 2014)

Dalam perjalanan evolusi sosial dan pembangunan, masyarakat kita masih menghadapi tantangan besar terkait dengan kurangnya pemahaman dalam meningkatkan keeluasaan. Seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi, seringkali kita menyaksikan kesenjangan antara potensi keeluasaan yang ada dan pemahaman masyarakat terkait manfaatnya. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat tentang pentingnya meningkatkan keeluasaan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketidakpahaman ini bisa menciptakan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan transformasional yang diperlukan untuk menanggapi tantangan ekologis dan pembangunan yang ada.

Setiap program yang tertuju untuk peningkatan kesejahteraan terutama pada pembangunan di desa-desa sering mendapatkan pembicaraan di beberapa pihak terutama dalam kaitannya dengan

peningkatan produksi bahan pangan, pertanian serta lainnya. Hal ini menjadi point krusial bagi setiap pemerintahan yang perlu diperbaiki kembali terutama seperti kasus yang menimpa negara Indonesia sendiri seperti akibat kelaparan hingga menyebabkan kematian dan hal ini dikarenakan program kurang memperhatikan tantangan yang ada (Rosyid, 2015).

Pemerintahan memiliki manajemen sendiri disetiap kawasan yang ditempatinya. Tentunya hal ini menyesuaikan era modernisasi sehingga perlu adanya transformasi seiring berjalannya waktu dan juga hal ini dipengaruhi oleh tuntutan globalisasi. Setiap manajemen memiliki pola tersendiri agar bisa berjalan lancar. Pemerintah saat ini menerapkan manajemen kebijakan yang modern dan demokratis agar bisa menyesuaikan nilai-nilai modern dan juga sebagai bentuk implikasi nilai yang ada di kancah global. Transformasi kebijakan diperlukan karena setiap pemerintah perlu menata ulang sistem kebijakannya yang tidak terlepas dari peraturan yang ada pada globalisasi serta menyesuaikan modernisasi saat ini (Widanarto, 2016).

Mekanisme yang diciptakan, tentu memiliki fungsi yang bersifat dinamis agar bisa tetap dalam proses yang seimbang. Hal ini tertuju karena setiap kebijakan memiliki tujuan dimana setiap kebijakan pemerintah punya sasaran kelompok serta kawasan sehingga hal ini dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Namun, jika ada suatu tantangan yang tidak bisa dicegah, hal ini dapat merusak sistem kebijakan yang sudah diterapkan terutama dalam titik keseimbangan secara alamiah. Dalam konteksnya sendiri, suatu ekologi pemerintahan memiliki titik keseimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan serta hal ini bersifat evolutive ataupun dikarenakan sangat lambat dalam tahapan prosesnya (Kurniawan, 2021).

Pada era perkembangan yang cepat ini, isu-isu terkait dengan ekologi dan pembangunan

kota-desa menjadi fokus permasalahan yang mendalam di berbagai lapisan masyarakat. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan populasi yang pesat mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi kebijakan guna menghadapi tantangan ini. Tujuan utama dari dinamika transformasi kebijakan pemerintah ini adalah menciptakan langkah-langkah strategis yang dapat merespons dengan efektif dan berkelanjutan terhadap kompleksitas masalah ekologi dan pembangunan kota-desa.

Meskipun telah terjadi sejumlah transformasi kebijakan, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan dan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Setiap kebijakan pemerintah baik yang sebelum ditransformasi ataupun sudah memiliki kelemahan terutama dalam mengimplementasikannya (Zavratnik et al., 2020). Terutama pada bagian masyarakat yang kurang paham dalam menangani permasalahan yang ada pada lingkungan sekitarnya sehingga pemerintah perlu memberi arahan terkait kebijakan yang akan direalisasikannya. Pada tulisan ini juga memilik harapan dimana setiap masyarakat perlu memahami setiap transformasi kebijakan pemerintah karena dengan konteks yang menuju kesejahteraan yang meningkat tentu ekologi dan pembangunan yang ada baik pada kawasan kota-desa harus memberikan kontribusi yang cukup besar. Selain itu, pemerintah yang ingin merealisasikan kebijakannya juga harus paham dengan isu yang ada di lingkungan ataupun kawasan yang ingin ditingkatkan keberlangsungan hidup masyarakat (Dianati & Turcu, 2023). Oleh karena itu, pada tulisan ini juga dapat memberikan pemahaman bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan proses keberlanjutan kota-desa. Sebab, urgensinya cukup besar karena terletak pada perumusan kebijakan pemerintah yang tidak hanya harus efektif tapi disusun secara sistematis dan juga tentunya yang paling penting diterima oleh masyarakat

sekitar saat diimplementasikan. Pada hal ini juga, tantangan yang diberlakukan menyesuaikan dengan isu modern karena mengikuti perkembangan globalisasi sehingga setiap transformasi kebijakan pada suatu kawasan berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti perubahan iklim, kondisi sumber daya alam yang mampu meningkatkan keberlanjutan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menangani kasus yang ada pada suatu kawasan daerahnya sendiri baik dari kota maupun desa.

Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik adalah suatu kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan proses pembuatan, implementasi, dan dampak kebijakan pemerintah. Kebijakan publik juga bisa disebutkan sebagai beberapa rangkaian keputusan setiap individu dan hal tersebut juga berlaku kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan dalam mencapai berbagai tujuan tertentu (Rushananto, 2014). Teori ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan dirumuskan, dijalankan, dan dievaluasi dalam konteks kebijakan publik. Teori kebijakan publik diuraikan sebagai kerangka kerja yang membantu mengurai kompleksitas keputusan kebijakan. Dalam teori ini juga menyoroti pentingnya memahami siklus kebijakan publik, yang melibatkan tahap identifikasi isu, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Teori ini menekankan bahwa pembuatan kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, nilai-nilai, dan kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam prosesnya.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teori kebijakan publik memainkan peran kunci dalam membuka wawasan terhadap perjalanan kebijakan dari konsepsi hingga implementasi. Teori kebijakan publik juga dimanfaatkan untuk memahami proses

pembuatan kebijakan pemerintah dalam konteks ekologi dan pembangunan kota-desa. Analisis ini akan mencakup tahapan identifikasi isu, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Dalam konteks teori, pembahasan tentang teori kebijakan publik memberikan kerangka kerja analitis untuk memahami proses pembentukan dan implementasi kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, artikel dapat menguraikan faktor-faktor kebijakan yang memotivasi transformasi pemerintah, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk mencapai tujuan ekologis dan pembangunan yang berkelanjutan (Grant et al., 2017).

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan mencakup perencanaan dan implementasi kebijakan yang memastikan terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks artikel, konsep pembangunan berkelanjutan dapat digunakan untuk menilai dampak jangka. Pada kesejahteraan sosial disini ditekankan pada pengertian yang mengarah kepada masyarakat yang sejahtera ekonominya, merata pendidikan yang diberikan serta jaminan kesehatan nasionalnya juga memberikan kesejahteraan pada lingkungan sekitar (Suparmoko, 2020). Pada konsep ini memandang pembangunan sebagai suatu upaya yang harus mencapai keseimbangan antara tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi. Pemahaman ini menuntut bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam hal ini menyoroti pentingnya dimensi berkelanjutan dalam pembangunan, menekankan perlunya perubahan paradigma dari model pertumbuhan ekonomi

konvensional menuju strategi yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ilmu pemerintahan, konsep ini menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang merangkul aspek ekologi dan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keseimbangan ini menjadi klaim utama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang memastikan pemanfaatan sumber daya secara bijak, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam kata lain juga, konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi kerangka teoritis, tetapi juga pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Implementasi konsep ini melibatkan interaksi yang kompleks antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merumuskan solusi yang holistik dan berkelanjutan terhadap tantangan pembangunan. Fokusnya juga, untuk mencapai keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi, konsep ini cukup komprehensif tentang efektivitas dan dampak transformasi kebijakan pemerintah pada tingkat lokal. Sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan sebesar apa pengaruh transformasi kebijakan dari pemerintah tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat di kota-desa (Runa, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang bisa dipaparkan secara jelas melalui pembahasan deskripsi. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui studi literatur dan analisis dokumen yang diperoleh dari setiap dokumen resmi yang ada. Studi literatur yang ditemukan tentunya berkaitan dengan sumber utama dari tema tersebut. Selain itu juga,

menemukan beberapa sumber referensi dari jurnal serta buku yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kebijakan publik serta menekan pada peristiwa yang pernah terjadi. Hasil tulisan ini melakukan teknik pengumpulan data agar bisa mendapatkan keabsahan data setiap tulisan yang diperoleh. Sehingga setiap tulisan yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan pada tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Transformasi Kebijakan Pemerintah

Transformasi kebijakan pemerintah dalam konteks pembangunan kota-desa mencakup restrukturisasi dan penyempurnaan berbagai regulasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah telah merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada aspek ekologi, dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, pengelolaan limbah, dan pelestarian lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Pemerintah menjawab tantangan pembangunan dengan inovasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Inovasi ini mencakup pemanfaatan teknologi modern dalam pemantauan lingkungan, digitalisasi proses administratif, dan penggunaan platform partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Inovasi-inovasi ini mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika perubahan sosial dan teknologi, mengintegrasikan pendekatan baru dalam kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Kartono M.Si & Nurcholis M.Si, 2015).

Transformasi kebijakan tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan

utama adalah resistensi dan ketidakpastian dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan. Kelompok kepentingan tertentu mungkin menolak perubahan karena menganggapnya merugikan, sementara ketidakpastian terkait dampak jangka panjang kebijakan baru dapat menciptakan ketidakpastian di tingkat masyarakat dan sektor bisnis. Saat pemerintah berupaya melakukan transformasi kebijakan untuk membangun kota-desa yang berkelanjutan, sejumlah tantangan kompleks muncul yang perlu diatasi. Pertama-tama, resistensi dari sejumlah pihak, termasuk kelompok industri dan pemilik modal, dapat menjadi kendala signifikan. Mereka mungkin menghadapi ketidaknyamanan terkait dengan perubahan regulasi yang berdampak pada model bisnis mereka. Tantangan lainnya melibatkan kurangnya pemahaman atau dukungan dari masyarakat terhadap perubahan kebijakan. Pendidikan dan sosialisasi yang memadai perlu diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami urgensi dan manfaat dari transformasi kebijakan tersebut. Selain itu, masalah administratif dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan, mengingat penerapan kebijakan yang baru membutuhkan kapasitas dan keahlian tambahan di tingkat birokrasi (Chen & Liu, 2022).

Selanjutnya, ketidakpastian dalam hal keberlanjutan dan hasil jangka panjang menjadi tantangan serius. Proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan sering memerlukan investasi waktu yang cukup lama untuk melihat dampak positifnya, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pemangku kepentingan. Selain itu, dalam kasus transformasi kebijakan terkait ekologi dan pembangunan, aspek keberlanjutan ekonomi juga harus diperhitungkan. Pemerintah perlu menavigasi tantangan kompleks ini dengan bijaksana, mengambil langkah-langkah untuk mendukung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan

bahwa sumber daya dan kebijakan yang diterapkan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah efektif dalam mewujudkan konsep ekologi dan pembangunan. Evaluasi ini melibatkan pengukuran dampak kebijakan terhadap pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan sejauh mana kebijakan pemerintah dapat mewujudkan konsep tersebut dalam praktek, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut.

Dinamika Perubahan dalam Kebijakan Ekologi dan Pembangunan

Dalam dinamika perubahan kebijakan ekologi dan pembangunan, terjadi serangkaian transformasi yang berdampak signifikan pada kota-desa dan ekosistem sekitarnya. Perubahan ini mencakup revisi kebijakan eksisting, pembentukan kebijakan baru, dan penyesuaian strategi pembangunan. Efek dari perubahan ini sangat terlihat dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, pemantauan lingkungan yang lebih ketat, dan peningkatan kualitas infrastruktur kota-desa. Perubahan yang terjadi saat pemerintah melakukan transformasi kebijakan pada ekologi dan pembangunan kota-desa membawa dampak yang mencolok terhadap lingkungan dan pola pembangunan wilayah tersebut. Transformasi kebijakan ini sering kali mencakup perubahan dalam regulasi pengelolaan lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan pengembangan infrastruktur. Misalnya, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terkait penggunaan lahan, mengarah pada pertumbuhan kota-desa yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam,

seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang lebih baik, dapat menjadi bagian dari transformasi ini, menciptakan dampak positif pada ekologi setempat (Alakavuk, 2023).

Efek transformasi kebijakan ini juga mencakup perkembangan dalam pembangunan kota-desa. Perubahan kebijakan dapat merangsang investasi dalam infrastruktur hijau, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas umum, dan penciptaan ruang terbuka yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, perlu diakui bahwa efeknya tidak selalu bersifat unidimensional. Beberapa perubahan kebijakan juga dapat menimbulkan ketidakpastian atau dampak negatif, terutama jika tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai atau jika tidak memperhitungkan kebutuhan lokal secara holistik

Dinamika perubahan kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai respons adaptif pemerintah terhadap tuntutan keberlanjutan dan perubahan sosial. Terjadi peningkatan kesadaran terhadap urgensi pelestarian lingkungan dan perlunya pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Transformasi kebijakan ini membawa dampak yang signifikan pada keberlangsungan masyarakat, menciptakan peluang baru dan sekaligus menimbulkan tantangan.

Efek transformasi kebijakan menciptakan dinamika positif dan negatif, terutama dalam konteks ekologi pembangunan. Pada sisi positif, masyarakat menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, menciptakan ruang partisipatif yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya. Namun, di sisi lain, ada tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, terutama dari sektor industri yang mungkin terpengaruh secara langsung oleh kebijakan baru (Zavratnik et al., 2020).

Keberlanjutan masyarakat dalam menghadapi transformasi kebijakan pemerintah dan pembangunan menjadi kunci. Hal ini

melibatkan upaya untuk memastikan bahwa transformasi tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi dan pembangunan jangka panjang. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses ini, sambil membangun kesadaran akan manfaat dan tantangan yang mungkin timbul. Dengan demikian, dinamika perubahan kebijakan ekologi dan pembangunan menciptakan landasan untuk keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan kota-desa dan pelestarian lingkungan.

Implikasi terhadap Keberlanjutan dan Partisipasi Masyarakat

Implikasi terhadap keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam konteks transformasi kebijakan pemerintah menjadi langkah kritis dalam mengarahkan pembangunan kota-desa menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Tahap selanjutnya dari pemerintah harus mencakup langkah-langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Ini melibatkan peningkatan efisiensi dan signifikansi konsep pembangunan, dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya yang lebih bijaksana, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa transformasi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan (Mustari, 2015).

Transformasi kebijakan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan, dan oleh karena itu, kebijakan harus dirancang untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Meskipun pengaruh transformasi kebijakan ini dapat membawa dampak positif pada partisipasi masyarakat, respon dari

masyarakat sendiri dapat bervariasi. Ada respon positif yang tercermin dalam keterlibatan aktif dan dukungan terhadap program-program transformasi. Namun, seiring dengan itu, ada juga respon negatif yang mungkin muncul, terutama jika tidak terpenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara memadai.

Transformasi kebijakan pemerintah memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap lingkungan di masyarakat, terutama dalam konteks konsep ekologi pembangunan di lokasi kota-desa. Perubahan kebijakan ini dapat menciptakan dampak positif pada ekosistem setempat dengan memperkenalkan langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misalnya, penerapan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan lahan dapat memastikan bahwa pembangunan kota-desa dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologi. Langkah-langkah seperti pelestarian ruang terbuka hijau, pengelolaan air yang bijaksana, dan perlindungan terhadap biodiversitas dapat menjadi bagian integral dari transformasi kebijakan.

Konsep ekologi pembangunan di kota-desa juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih efisien, dan transportasi berkelanjutan. Transformasi kebijakan yang mendukung infrastruktur hijau dan inisiatif pengembangan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang lebih seimbang antara pertumbuhan kota-desa dan pelestarian lingkungan. Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan ini untuk menciptakan visi pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekologi (Gómez-baggethun et al., 2013). Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi transformasi kebijakan juga dapat menimbulkan beberapa tantangan. Misalnya, pemangku kepentingan tertentu mungkin mengalami resistensi terhadap kebijakan baru

yang dapat memengaruhi kepentingan mereka. Setiap pemerintah perlu adanya konsep untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan edukasi sangat penting untuk merespons secara efektif terhadap implikasi transformasi kebijakan terhadap lingkungan di masyarakat, khususnya dalam konteks konsep ekologi pembangunan di lokasi kota-desa (Pataki, 2015).

Tujuan akhir dari transformasi kebijakan pemerintah adalah mencapai keberlanjutan dan pembangunan yang merata. Ini melibatkan pencapaian keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk mengukur dampak kebijakan, merespons umpan balik masyarakat, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar transformasi dapat mengarah pada pencapaian tujuan akhir yang mendukung keberlanjutan dan partisipasi masyarakat yang inklusif.

KESIMPULAN

Dalam menanggapi tantangan dan dinamika transformasi kebijakan pemerintah pada ekologi dan pembangunan kota-desa, penelitian ini menyoroti beberapa aspek kunci yang mempengaruhi perubahan tersebut. Terdapat isu-isu utama yang perlu diperhatikan, seperti perubahan dalam regulasi pengelolaan lingkungan, efek terhadap pembangunan kota-desa, dan dampak pada partisipasi masyarakat. Transformasi kebijakan memunculkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap keberlanjutan ekologi dan pembangunan wilayah.

Dalam proses transformasi kebijakan, pemerintah telah mencapai beberapa hasil positif, seperti perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan

infrastruktur hijau, dan peningkatan efisiensi energi. Namun, tantangan-tantangan muncul, termasuk resistensi dari sektor industri tertentu dan ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang kebijakan baru. Efeknya, baik positif maupun negatif, dirasakan dalam berbagai aspek ekologi pembangunan, menciptakan dinamika perubahan yang kompleks.

Selain itu, implementasi transformasi kebijakan memiliki implikasi besar terhadap keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Respons masyarakat terhadap transformasi kebijakan adalah kunci untuk memahami sejauh mana dampak kebijakan dapat diterima dan diadopsi.

Sehingga dalam hal ini juga setiap transformasi kebijakan pemerintah pada ekologi dan pembangunan kota-desa adalah langkah yang penting dalam mencapai keberlanjutan. Perubahan kebijakan harus diarahkan pada menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Setiap kebijakan tentu harus menghadapi semua kompleksitas tantangan dan dinamika transformasi kebijakan pemerintah pada ekologi dan pembangunan kota-desa, menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alakavuk, E. (2023). Sustainable Communities, Neighborhoods, Cities And Their Criteria. *The European Journal Of Research And Development*, 2(2), 287–289. <https://doi.org/10.56038/Ejrnd.V2i2.66>

April, M., Alkadafi, M., & Wahyudi, R. (2021). Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau). *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.24014/Jel.V12i1.13254>

Chen, X., & Liu, C. (2022). Urbanization , Economic Development , And Ecological Environment : Evidence From Provincial Panel Data In China. *Sustainability Science*, 14(1124), 1–15.

Cipta, T. H. A. K., & Pidana, K. (2014). *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*.

Dianati, V., & Turcu, C. (2023). Place (Un) Making Through Soft Urban Densification : Exploring Local Experiences Of Density And Place Attachment In Tehran ABSTRACT. *International Journal Of Urban Sustainable Development*, 15(1), 63–79. <https://doi.org/10.1080/19463138.2023.2184825>

Gómez-Baggethun, E., Gren, Å., Barton, D. N., Langemeyer, J., McPhearson, T., Farrell, P. O., Andersson, E., Hamstead, Z., & Kremer, P. (2013). *Urban Ecosystem Services* (Issue 1). <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7088-1>

Grant, M., Brown, C., Caiaffa, W. T., Capon, A., Coutts, C., Crespo, C. J., Ellis, G., Ferguson, G., Hancock, T., Lawrence, R. J., Nieuwenhuijsen, M. J., Thompson, S., Wagenaar, C., Thompson, C. W., Grant, M., Brown, C., Caiaffa, W. T., Capon, A., Corburn, J., ... Thompson, S. (2017).

- Cities And Health: An Evolving Global Conversation. *Cities & Health*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/23748834.2017.1316025>
- Grimm, N. B. (2008). Global Change And The Ecology Of Cities. In *SCIENCE* (Vol. 319, Issue May 2014). <https://doi.org/10.1126/Science.1150195>
- Hague, C., Harridge, C., Julyan, B., Nik, R., Tant, I., & Payne, G. (2023). Planning , Sustainable Urbanisation And The Commonwealth : The Commonwealth Association Of Planners , Past , Present And Future Commonwealth : The Commonwealth. *International Journal Of Urban Sustainable Development*, 15(1), 321–322. <https://doi.org/10.1080/19463138.2023.2281817>
- Hoffmann, E. M., Schareika, N., Dittrich, C., Schlecht, E., Sauer, D., & Buerkert, A. (2023). Rurbanity: A Concept For The Interdisciplinary Study Of Rural–Urban Transformation. *Sustainability Science*, 18(4), 1739–1753. <https://doi.org/10.1007/S11625-023-01331-2>
- Jambi, P. (2021). 3 1,2,3. 3(9), 587–599.
- Jemadu, A. (2003). Pembangunan Dan Modernisasi: Implikasinya Terhadap Tatanan Ekologi Dan Sosial. *JAP*, 2003(2), 222–234.
- Kartono M.Si, D. D. T. K., & Nurcholis M.Si, P. D. H. (2015). *Konsep Dan Teori Pembangunan*.
- Kirkpatrick, C., George, C., Scricciu, S. S., & Affairs, R. (2004). The Implications Of Trade And Investment Liberalisation For Sustainable Development: Review Of Literature. In *Environment* (Issue May).
- Kurniawan, S.IP., M.A, D. R. C. (2021). *Ekologi Pemerintahan*.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif* (Vol. 1).
- Pataki, D. E. (2015). Grand Challenges In Urban Ecology. *Frontiers In Ecology And Evolution*, 3(June), 2–3. <https://doi.org/10.3389/Fevo.2015.00057>
- Purnaweni, H., Yazid, I., Arifah, M. N., & Qomariah, A. (2021). Community Development In Kemijen Village, East Semarang: A Corporate Social Responsibility In Practice. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 83–88. <https://doi.org/10.14710/Jil.19.1.83-88>
- Rosyid, N. (2015). Ekologi Politik Dan Dinamika Sosio-Ekonomi Di Dataran Tinggi Kabupaten